

RENCANA INDUK PENELITIAN TAHUN 2024-2028

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
1	Politik Dalam Negeri	Mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, serta terjaganya stabilitas politik dalam negeri yang mendukung demokratisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pemilu dan Pilukada 	a. Politik uang	Kekuatan modal masih mempengaruhi pengembangan demokrasi. Banyak kepala daerah yang tertangkap KPK karena harus mengembalikan modal. Dalam hal kekuatan kapital tidak selalu linear dengan keterpilihan karena aspek demografi dan incumbent yang mencalonkan kembali di periode kedua.
				b. Tingkat partisipasi masyarakat	Demokrasi yang makin dewasa selalu diikuti dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam beragam aspek yang makin tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pilukada.
				c. Netralitas ASN	Cukup Jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masih ditemukan banyak pelanggaran.
				d. Dinasti Politik	Isu dinasti politik pada tahun 2024 menjadi isu yang paling trending terutama dalam pemilihan presiden. Sebenarnya istilah dinasti politik sudah dikenal sejak lama bahkan banyak diterapkan di daerah mulai dari pemerintahan tingkat desa, dimana anak dan atau istri kepala desa melanjutkan jabatan kepala desa yang ditinggalkan oleh ayahnya atau suaminya.
				e. Pragmatisme Partai Politik	Elektabilitas dan popularitas tokoh masyarakat menjadi perhatian partai politik. Namun hal ini tidak cukup karena proses demokrasi membutuhkan biaya yang besar sehingga pragmatism partai lebih utama dibandingkan idealisme partai, akibatnya partai tidak melakukan kaderisasi secara terstruktur.

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
				f. Dampaknya terhadap kondisi perkenomioian (Nasional dan Lokal)	Data statistik menunjukkan pelaksanaan pemilu sering mempengaruhi tingkat inflasi karena meningkatnya jumlah uang beredar sehingga perlu dilihat pengaruh pelaksanaan pemilu terhadap perkembangan ekonomi nasional dan lokal.
				g. Korelasi dengan perkembangan PAD	Pelaksanaan pemilu legislative maupun kepala daerah meningkatkan jumlah pinjaman di sektor perbankan. Hal ini tidak jarang menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, dan pajak-pajak lain.
			<ul style="list-style-type: none"> • Kerukunan beragama <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Umat</p>	a. Toleransi kerukunan umat beragama	Keyakinan masyarakat terhadap kepercayaannya sering kali diwujudkan dalam bentuk asosial terhadap kepercayaan yang tidak sejalan dengan mereka, ditunjukkan oleh penolakan terhadap pembangunan rumah-rumah ibadah ataupun penolakan terhadap ibadah yang dilakukan di rumah-rumah. Seringkali penolakan tersebut atau keyakinan bahwa kelompoknya paling benar dipublikasikan secara luas melalui media sosial sehingga menimbulkan kerawanan konflik stabilitas.
				b. Pengaruh kearifan local dalam membangun kerukunan umat beragama	Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam dalam hal budaya, agama, ras, bahasa, dan hal lainnya. Namun semangat bertoleransi tidak selalu sejalan dengan konsep Bhineka Tunggal Ika. Sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antara tokoh umat beragama
				c. Dinamika kerukunan umat beragama	Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) adalah Lembaga non structural di daerah yang anggotanya terdiri dari unsur aparatur dan tokoh agama. Efektifitas Lembaga ini sangat dipengaruhi oleh program pemerintah dalam meningkatkan toleransi umat beragama. Komitmen kepala daerah terhadap operasional Lembaga FKUB

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan konflik sosial 	<p>a. Implementasi budaya adat</p> <p>b. Peran serta LSM</p>	<p>menjadi faktor kunci yang dapat mengendalikan dinamikan kerukunan umat beragama.</p> <p>Implementasi budaya adat dapat menjadi sumber konflik yang signifikan karena adakalanya kebijakan nasional bersinggungan dengan norma-norma budaya lokal. Dalam hal ini, perlu dipelajari bagaimana mengintegrasikan kebijakan nasional dengan penghargaan terhadap budaya adat guna menciptakan harmoni dan dukungan masyarakat.</p> <p>Peran serta LSM dapat menimbulkan konflik terkait kontrol dan pemantauan kebijakan pemerintah. Penelitian dapat difokuskan pada memahami dinamika hubungan antara pemerintah dan LSM serta mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kolaborasi yang konstruktif.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan wawasan kebangsaan 	<p>a. Pembinaan Ideologi Pancasila</p> <p>b. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Gen-Z</p>	<p>Konflik dalam penelitian pembinaan ideologi Pancasila dapat berkisar pada perbedaan interpretasi dan pemahaman ideologi ini di kalangan masyarakat. Penelitian harus mengeksplorasi bagaimana berbagai kelompok masyarakat dan elemen kebudayaan menerapkan dan memahami ideologi Pancasila. Analisis terhadap resistensi atau ketidaksetujuan terhadap konsep Pancasila serta upaya membangun kesepahaman dan konsensus dapat menjadi fokus penelitian.</p> <p>Penelitian perlu menyoroti cara nilai-nilai Pancasila diterapkan dan diartikulasikan oleh generasi Z. Faktor-faktor apa yang memengaruhi pemahaman mereka terhadap nilai-nilai ini, bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan pengaruh global, dan apakah ada ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai global yang dianut oleh Gen-Z menjadi aspek-aspek kunci untuk dieksplorasi.</p>

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
				c. Pembentukan Karakter Cinta Tanah Air	Pembentukan karakter cinta tanah air menjadi isu yang relevan, terutama dalam konteks globalisasi. Bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan dengan pemahaman yang lebih luas tentang kewarganegaraan dan tanggung jawab global menjadi tema penelitian yang potensial.
			<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan pangan 	a. Pencegahan Stunting	Konflik dalam konteks pencegahan stunting dapat berkaitan dengan implementasi kebijakan, distribusi sumber daya, dan pemahaman masyarakat. Penelitian harus mengidentifikasi hambatan dalam implementasi program pencegahan stunting, mengukur efektivitas program-program yang telah diluncurkan, dan mengeksplorasi persepsi serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.
				b. Urban Farming	Penelitian tentang urban farming perlu memahami konflik potensial terkait perubahan tata ruang kota, regulasi, dan pendekatan berbasis masyarakat. Analisis dampak urban farming terhadap ketersediaan lahan, keamanan pangan, dan hubungan dengan sektor pertanian konvensional menjadi penting. Studi ini juga harus mengevaluasi bagaimana urban farming dapat diintegrasikan dengan baik dalam konteks perkotaan yang berkembang.
				c. Pengembangan UMKM	Konflik dalam penelitian pengembangan UMKM dapat mencakup aspek-aspek seperti akses ke modal, peraturan dan regulasi, serta persaingan dengan perusahaan besar. Studi perlu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi UMKM dalam berbagai sektor, menganalisis dampak kebijakan dan program dukungan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM.

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
			<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan demokrasi 	a. Demokrasi Era Digital	<p>Penelitian dalam konteks demokrasi era digital harus mengeksplorasi tantangan dan konflik terkait privasi, keamanan data, dan manipulasi informasi. Selain itu, perlu dipahami bagaimana peran media sosial dan teknologi informasi mempengaruhi partisipasi politik, distribusi informasi, dan kualitas diskusi demokratis. Analisis tentang dampak negatif dan positif dari transformasi digital terhadap demokrasi perlu ditekankan dalam penelitian ini.</p>
				b. Urgensi Demokrasi di Era Global	<p>Urgensi demokrasi di era global merupakan konsep penting yang memerlukan penelitian mendalam tentang bagaimana Indonesia dapat memainkan peran yang konstruktif di tingkat global, sambil menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Integrasi data dan perspektif multi-stakeholder dapat menjadi pendekatan penelitian yang bermanfaat dalam menyelidiki konflik dan peluang dalam isu ini.</p>
2	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Penguatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan regulasi, kelembagaan, dan inovasi daerah, serta kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang DKI 	a. Dampak perpindahan Ibukota terhadap potensi PA	<p>Penelitian harus mendalam tentang bagaimana perpindahan ibukota berdampak pada potensi penerimaan pajak daerah. Ini melibatkan evaluasi terhadap perubahan pola ekonomi dan infrastruktur, serta upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi PAD dengan memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul akibat perpindahan ibukota.</p>
				b. kepemimpinan kepala daerah	<p>Konflik dalam kepemimpinan daerah dapat berasal dari dinamika politik lokal, perubahan kebijakan, atau resistensi dari pihak-pihak tertentu. Penelitian harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan kepala daerah, melibatkan analisis dukungan masyarakat, dinamika politik lokal, dan kemampuan kepemimpinan individu.</p>
				c. keberlanjutan lingkungan	<p>Studi tentang keberlanjutan lingkungan dalam konteks desentralisasi harus mengevaluasi dampak kebijakan dan tindakan pemerintah</p>

LEMBAGA PENELITIAN



NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
					daerah terhadap lingkungan. Ini melibatkan analisis kebijakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta upaya pemulihan dan konservasi lingkungan di tingkat lokal.
				d. realisasi PAD jakarta pasca pemindahan ibu kota negara	Penelitian perlu membahas perubahan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jakarta setelah pemindahan ibu kota. Ini termasuk analisis pengaruh perpindahan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan restrukturisasi ekonomi lokal terhadap pendapatan daerah.
			• Undang-Undang IKN	a. Politik Hukum Investasi dalam Pembangunan IKN	Konflik dalam politik hukum investasi berkaitan dengan regulasi dan kebijakan investasi di kawasan Ibu Kota Negara baru. Penelitian harus mengeksplorasi dampak hukum dan politik dari investasi ini, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan penyesuaian untuk mendukung pembangunan IKN.
				b. Pemungutan pajak khusus di IKN	Penelitian perlu memeriksa peran dan dampak dari pemungutan pajak khusus di kawasan Ibu Kota Negara baru. Ini melibatkan analisis regulasi, kepatuhan pajak, dan dampaknya pada penerimaan daerah dan pembangunan infrastruktur di IKN.
			• DOB, Penataan Daerah, Serah terima aset DOB.	a. Restrukturisasi dalam penataan DOB	Konflik terkait restrukturisasi dalam penataan Daerah Otonomi Baru (DOB) memerlukan penelitian tentang perubahan tata kelola, pembagian kekuasaan, dan interaksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola DOB.
				b. Penataan ruang kota	Studi tentang penataan ruang kota harus memeriksa kebijakan dan implementasinya dalam menghadapi perubahan tata ruang kota pembentukan pemerintahan daerah yang baru. Ini melibatkan evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari perubahan ini.

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
				c. Masterplan budgeting	Penelitian pada masterplan budgeting memerlukan analisis terhadap bagaimana perencanaan dan alokasi anggaran daerah dapat mendukung pembangunan di DOB. Ini melibatkan evaluasi kebijakan anggaran, keberlanjutan, dan keseimbangan antara berbagai sektor pembangunan.
			● Kerjasama Daerah	a. Perbedaan Kapasitas pemerintah daerah	Studi harus menyoroti perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola perubahan terkait desentralisasi, khususnya di DOB. Faktor-faktor seperti sumber daya manusia, sistem administrasi, dan dukungan teknis perlu diperinci.
				b. Sumber daya keuangan	Penelitian harus mengidentifikasi mekanisme penanganan konflik dan perselisihan antara pemerintah pusat dan daerah, serta di antara pemerintah daerah. Ini melibatkan analisis efektivitas lembaga penyelesaian sengketa dan mekanisme mediasi.
				c. Penanganan konflik dan perselisihan	Konflik terkait sumber daya keuangan melibatkan distribusi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai daerah. Penelitian harus menggali dampak perubahan kebijakan terhadap sumber daya keuangan daerah, keseimbangan keuangan pusat-daerah, dan penerapan prinsip keadilan fiskal.
3	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, serta pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan public dan	● Administrasi data kependudukan	a. Digitalisasi e -KTP menjadi KTP digital	Penelitian perlu mendalami dampak dan tantangan terkait transformasi dari e-KTP ke KTP digital. Ini mencakup aspek penerapan teknologi, perubahan regulasi, dan adaptasi masyarakat terhadap pergeseran ini. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan dan bagaimana meminimalkan potensi konflik atau resistensi dalam implementasi KTP digital.

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
		kepentingan pembangunan nasional			
				b. Validasi data kependudukan	Konflik penelitian berkaitan dengan validasi data kependudukan mencakup analisis keberhasilan proses validasi, perbandingan data internal dan eksternal, dan bagaimana mengatasi ketidaksesuaian data. Penting untuk memahami konsekuensi ketidakakuratan data terhadap kebijakan publik dan menilai apakah langkah-langkah validasi saat ini memadai.
				c. Keamanan data kependudukan	Fokus penelitian pada keamanan data kependudukan harus mencakup evaluasi terhadap infrastruktur keamanan yang ada, risiko potensial kebocoran atau penyalahgunaan data, serta langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data sensitif tersebut. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan data dan mendukung transisi menuju sistem yang lebih aman.
			• Keamanan data pribadi	a. Website Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Keefektifan dan keefisienan penggunaan website Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam menyediakan layanan administrasi kependudukan. Sseberapa baik SIK dalam memenuhi kebutuhan pengguna, tingkat aksesibilitasnya, kemudahan navigasinya, serta sejauh mana pemanfaatan teknologi tersebut telah mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
				b. Kepatuhan dengan Regulasi	Tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan data, perlindungan privasi individu, dan konsistensi dalam penerapan regulasi yang berlaku.
				c. Perlindungan Hukum Data Kependudukan	Efektivitas sistem perlindungan hukum terhadap data kependudukan yang dikelola oleh lembaga administrasi kependudukan. Isu-isu

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
					seperti keamanan data, privasi individu, serta mekanisme penegakan hukum dalam kasus pelanggaran atau penyalahgunaan data
			<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil 	<p>a. Integrasi data Kependudukan</p> <p>b. Pelayanan QR Code dalam data Kependudukan</p>	<p>Upaya untuk mengintegrasikan data kependudukan dari berbagai sumber menjadi satu platform yang terpadu. Kesulitan teknis dalam integrasi data, kebutuhan akan standar data yang konsisten, serta manfaat yang diharapkan dari integrasi data tersebut dalam meningkatkan efisiensi layanan administrasi kependudukan.</p> <p>Penerapan teknologi QR code dalam pelayanan administrasi kependudukan. Keamanan dan keefektifan penggunaan QR code sebagai metode identifikasi atau otentikasi, serta sejauh mana penerapan QR code dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan bagi masyarakat.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Standarisasi aplikasi 	<p>a. Integrasi Aplikasi</p> <p>b. Pelatihan Pengguna</p>	<p>Kecocokan antara aplikasi yang ada, kesulitan dalam interoperabilitas, serta manfaat dan tantangan dari integrasi aplikasi dalam meningkatkan pengelolaan data dan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi pengguna sistem administrasi kependudukan, termasuk petugas administrasi dan masyarakat umum. Masalah yang dicakup, yaitu seperti kurangnya aksesibilitas pelatihan, efektivitas metode pelatihan yang digunakan, serta dampak pelatihan terhadap peningkatan penggunaan sistem dan kualitas layanan.</p>
4.	Pembinaan Kewilayahan dan	Penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibum-linmas, peran	<ul style="list-style-type: none"> Batas wilayah DOB 	a. Koordinasi antar pemerintah	Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan kewilayahan dan pembangunan daerah. Ini dapat menghambat implementasi kebijakan dan program pembangunan yang efektif. Pertanyaannya adalah sejauh mana kolaborasi dan

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
	Pembangunan Daerah	gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		<p>b. Pengelolaan Konflik</p> <p>c. Pembagian Sumber Daya</p>	<p>komunikasi telah terjadi, apakah terdapat hambatan dalam pertukaran informasi, dan bagaimana koordinasi dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.</p> <p>Pengelolaan pembangunan daerah melibatkan penanganan perbedaan pendapat atau ketegangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini bisa termasuk konflik antara pemerintah dan masyarakat, antara sektor swasta dan publik, atau antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penting untuk memahami penyebab konflik dan mencari solusi yang berkelanjutan.</p> <p>Pembagian sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah, serta di antara berbagai daerah. Pembagian yang dimaksud mencakup alokasi anggaran, penggunaan lahan, atau distribusi infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa pembagian sumber daya tersebut adil dan efisien, serta mempertimbangkan kebutuhan yang beragam dari setiap daerah.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah 	<p>a. Pembangunan pusat koordinasi dan komunikasi</p> <p>b. Kepastian kebijakan pemerintah pusat</p>	<p>Pembangunan pusat koordinasi dan komunikasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan kewilayahan dan pembangunan daerah. Pusat tersebut dapat berfungsi sebagai tempat pertemuan dan kolaborasi, serta sebagai pusat informasi dan koordinasi untuk berbagai program dan proyek pembangunan. Hal ini dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan efisiensi dalam implementasi kebijakan dan program.</p> <p>Ketidakpastian atau perubahan dalam kebijakan pemerintah pusat dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat konsisten</p>

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
					<p>dan terkoordinasi dengan kebutuhan dan kondisi di tingkat daerah. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan memperkuat kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah.</p>
				<p>c. Perbedaan kondisi geografis</p>	<p>Perbedaan kondisi geografis antar daerah dapat menjadi faktor utama dalam pembangunan dan pembinaan kewilayahan. Daerah dengan kondisi geografis yang berbeda mungkin memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda pula, seperti aksesibilitas infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Penting untuk mempertimbangkan perbedaan ini dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan daerah.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<p>a. Dana perimbangan</p>	<p>Pembagian dana perimbangan yang adil dan transparan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Konflik mungkin muncul jika terjadi ketidaksetaraan dalam alokasi dana perimbangan atau jika mekanisme penentuan alokasi tersebut tidak jelas atau tidak adil.</p>
				<p>b. Ketergantungan pada Dana Hibah</p>	<p>Ketergantungan daerah pada dana hibah dari pemerintah pusat dapat menjadi sumber konflik, terutama jika dana tersebut tidak cukup stabil atau teratur. Daerah yang terlalu bergantung pada dana hibah mungkin mengalami kesulitan dalam merencanakan pembangunan jangka panjang dan dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri. Penting untuk mencari cara untuk mengurangi ketergantungan ini melalui diversifikasi sumber pendapatan.</p>
				<p>c. Kebijakan pajak dan retribusi</p>	<p>Kebijakan pajak dan retribusi ini dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat, investasi sektor swasta, dan daya saing daerah dalam menarik investasi. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan pajak dan retribusi tersebut adil, transparan, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.</p>

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
			<ul style="list-style-type: none"> Kinerja pembangunan daerah 	a. Grand Design pembangunan pusat dan daerah	Perbedaan visi, prioritas, dan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam penetapan grand design pembangunan pusat dan daerah. Penting untuk mencapai kesepakatan bersama dan memastikan bahwa grand design tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat.
			<ul style="list-style-type: none"> Urusan pemerintahan 	b. kepemimpinan dalam pembinaan pembangunan daerah	Perbedaan pendapat atau prioritas antara pemimpin daerah dan pusat, serta perbedaan gaya kepemimpinan, bisa menjadi sumber konflik. Penting untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang kuat dan kolaboratif tercipta di semua tingkatan pemerintahan untuk mengarahkan pembangunan daerah dengan efektif dan efisien.
				c. keberhasilan pembinaan kewilayahan	Pemerintah pusat dan daerah mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang kriteria dan indikator keberhasilan pembinaan kewilayahan. Penting untuk mengidentifikasi dan mengukur indikator keberhasilan yang dapat diterima bersama untuk memastikan evaluasi yang objektif dan keberlanjutan program pembinaan.
				a. Keberlanjutan lingkungan	Pembangunan daerah yang tidak berkelanjutan secara lingkungan adalah masalah yang cukup sering terjadi. Perbedaan pendapat tentang pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, pelestarian ekosistem, dan adaptasi terhadap perubahan iklim bisa menjadi sumber konflik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Penting untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam setiap tahap pembangunan daerah.
				b. Akuntabilitas dalam program pembangunan	Kekurangan dalam akuntabilitas dalam program pembangunan daerah menyebabkan masyarakat atau pihak-pihak terkait mungkin meragukan transparansi dan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu untuk

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
					<p>memastikan bahwa mekanisme akuntabilitas yang kuat dan transparan diterapkan untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas serta hasil dari setiap program pembangunan yang dijalankan.</p>
5.	Pemerintahan Desa	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pilkades • Penggunaan aset desa 	<p>a. intervensi partai politik dalam pilkades</p> <p>b. pengaruh politik identitas dalam pilkades</p> <p>a. Kapasitas pengelolaan aset</p> <p>b. Pemeliharaan aset desa</p>	<p>Partai politik yang terlibat secara aktif dalam Pilkades dapat memengaruhi proses demokratisasi di tingkat desa, membatasi aksesibilitas calon independen, atau menyebabkan polarisasi politik di antara warga desa. Perlu dicari solusi untuk memastikan bahwa Pilkades berlangsung secara adil, transparan, dan independen dari intervensi politik.</p> <p>Pengaruh politik identitas, seperti suku, agama, atau etnis, akan berdampak buruk dalam Pilkades. Dominasi atau penyalahgunaan identitas politik dapat memicu konflik antarwarga desa dan mengganggu proses pemilihan kepala desa yang berbasis pada kepentingan dan kualifikasi calon. Penting untuk mempromosikan keberagaman dan inklusivitas dalam proses Pilkades serta menghindari politisasi identitas sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan.</p> <p>Ketidakmampuan dalam manajemen aset desa, seperti tanah, infrastruktur, atau sumber daya alam dapat menyebabkan penyalahgunaan, penyelewengan, atau konflik kepentingan dalam penggunaan dan pemanfaatan aset desa. Perlu ditingkatkan kapasitas SDM di tingkat desa serta diterapkannya sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Ketidakmampuan dalam pemeliharaan aset dapat menyebabkan penurunan nilai dan kualitas serta meningkatkan risiko kerusakan dan kecelakaan. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat</p>

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
					akan pentingnya pemeliharaan aset serta memastikan adanya anggaran dan program pemeliharaan yang memadai.
				c. Pendanaan Pembangunan Desa	Persaingan atau pertentangan kepentingan antarstakeholder desa dalam menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan dana desa dapat menjadi sumber konflik. Penting untuk memastikan bahwa alokasi dana desa berdasarkan pada kebutuhan nyata dan partisipatif serta transparan dalam penggunaannya
			<ul style="list-style-type: none"> Efektifitas dan pencapaian APBDes dan sasaran 	a. Transparansi dan akuntabilitas	Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan program pembangunan desa menjadi faktor penting dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat. Ketidakjelasan dalam penggunaan dana desa atau kurangnya mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban bisa menyebabkan ketidakpercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu perlu untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan keuangan serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.
				b. Kemitraan dan kolaborasi	Ketidaksinambungan atau ketidakmampuan untuk bekerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pembangunan. Penting untuk mendorong terciptanya kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan serta memanfaatkan sumber daya dan kompetensi yang ada secara optimal.
				c. Kualitas pelaporan keuangan	Rendahnya kualitas pelaporan keuangan desa, seperti adanya penyimpangan, penyelewengan, atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan dapat menyebabkan masalah atau konflik di desa. Kualitas pelaporan keuangan yang buruk dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa serta mempersulit proses pengawasan dan evaluasi. Penting untuk

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
					meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam penyusunan laporan keuangan desa serta memastikan bahwa laporan tersebut dapat dipercaya dan transparan.
			<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas perangkat desa 	a. peningkatan kualitas pendidikan perangkat desa	Perlu dilakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugasnya dan Peningkatan kompetensi melalui pelatihan formal dan informal, termasuk pelatihan teknis terkait tugas administratif, manajemen keuangan desa, dan penerapan teknologi informasi.
				b. kualitas pelayanan publik pada pemerintah desa	Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti pembayaran online, pendaftaran kelahiran, atau aplikasi desa pintar dan Memberikan pelatihan kepada perangkat desa dalam mengadopsi dan mengelola teknologi informasi yang relevan
			<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan Desa 	a. sumbangsih BUMDES dalam organisasi perangkat desa	BUMDES dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan desa melalui kegiatan ekonomi produktif seperti pertanian, peternakan, kerajinan, dan sektor usaha lainnya dan Pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDES dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
				b. peran serta masyarakat dalam pengawasan kelembagaan organisasi perangkat desa	Masyarakat perlu diberikan akses mudah untuk menyampaikan keluhan atau saran terkait kelembagaan organisasi perangkat desa dan Musyawarah desa menjadi arena penting di mana masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka terkait pembangunan desa
				a. Analisis kebutuhan dan potensi local	Analisis kebutuhan dan potensi lokal merupakan tahap awal dalam perencanaan pembangunan desa. Tim perencanaan akan

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
			<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pembangunan desa 		<p>melakukan survei dan interaksi langsung dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi serta potensi yang dapat dikembangkan. Kebutuhan ini dapat mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Potensi lokal mencakup aset alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal yang dapat dijadikan landasan untuk pembangunan berkelanjutan.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan UMKM dan Kelompok masyarakat 	<p>b. Pengukuran dan evaluasi kinerja</p>	<p>Pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintahan desa sangat penting untuk memastikan efektivitas program-program yang telah diimplementasikan. Dalam hal ini, indikator kinerja harus ditentukan dengan jelas, dan data harus dikumpulkan secara teratur untuk menilai pencapaian tujuan pembangunan. Evaluasi kinerja dapat melibatkan aspek seperti pelayanan publik, administrasi desa, dan dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat</p>
				<p>a. Pengembangan keterampilan dan pelatihan</p>	<p>Pengembangan keterampilan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas anggota UMKM dan kelompok masyarakat. Ini dapat mencakup pelatihan dalam produksi, manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan. Kegiatan ini memungkinkan mereka menghadapi tantangan bisnis dengan lebih baik dan meningkatkan daya saing.</p>
				<p>b. Legalitas dan perizinan</p>	<p>Aspek legalitas dan perizinan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang teratur dan terpercaya. Memastikan bahwa UMKM dan kelompok masyarakat memiliki legalitas yang lengkap dan mematuhi peraturan akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis.</p>
				<p>c. Inovasi dan diversifikasi produk</p>	<p>Inovasi dan diversifikasi produk merupakan strategi untuk menghadirkan nilai tambah dan meningkatkan daya tarik produk. Ini melibatkan pengenalan produk baru, peningkatan kualitas, atau</p>

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
					penyesuaian terhadap tren pasar. Diversifikasi juga membantu mengurangi risiko terkait ketergantungan pada satu jenis produk.
6.	Penguatan Tata Kelola dan kelembagaan	Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dalam koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja KEMENDAGRI dalam mendukung reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Publik 	<p>a. Digitalisasi pelayanan publik</p> <p>b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>c. Kebijakan dalam pencegahan korupsi di pelayanan publik</p>	<p>Digitalisasi pelayanan publik melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. IPDN dapat mengimplementasikan e-government services, membangun aplikasi mobile, dan memastikan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung transformasi digital. Langkah ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi dengan Lembaga Penelitian IPDN.</p> <p>Pelayanan terpadu satu pintu melibatkan integrasi layanan agar dapat diakses melalui satu titik pusat. IPDN dapat membangun pusat layanan terpadu di lokasi strategis, mengintegrasikan sistem informasi, dan memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelayanan. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman pelayanan yang terpadu dan efisien bagi masyarakat.</p> <p>Pencegahan korupsi menjadi aspek penting dalam memperkuat tata kelola. IPDN dapat menerapkan kebijakan transparansi dan akuntabilitas, membangun sistem pelaporan whistleblower yang aman, dan mengadakan program pendidikan serta sosialisasi anti-korupsi secara rutin. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas korupsi, menjaga integritas lembaga, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.</p> <p>Mengembangkan portal informasi publik yang menyajikan data dan informasi pemerintahan daerah secara terperinci, seperti anggaran, kebijakan, dan hasil evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses mudah dan jelas terhadap informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<p>a. Tranparansi dan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p>	

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
					daerah. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipasi publik, seperti forum diskusi dan konsultasi publik, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
				b. Sinkronisasi antar lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan penegak hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Membentuk forum koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penegak hukum guna membahas isu-isu strategis, menyamakan visi-misi, dan menyinkronkan langkah-langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kerangka ini, mendorong penyusunan peraturan bersama antar lembaga untuk menjamin konsistensi dan keselarasan regulasi. Serta, pengembangan sistem pelaporan terpadu yang memungkinkan lembaga-lembaga terkait menyampaikan laporan kinerja secara terintegrasi guna meningkatkan koordinasi dan pemahaman bersama.
			• Pengawasan manajemen resiko	a. Peranan OMBUDSMAN dalam penanganan Maladministrasi di daerah	Terkait dengan maladministrasi di daerah, lembaga ini dapat memanfaatkan peran OMBUDSMAN sebagai wadah pengaduan masyarakat terhadap praktik-praktik pemerintahan yang tidak sesuai aturan. OMBUDSMAN dapat melakukan penyelidikan, memberikan rekomendasi perbaikan, dan turut serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
				b. Pengawasan implementasi kebijakan	Dalam hal pengawasan implementasi kebijakan, Lembaga Penelitian IPDN dapat membantu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Pendampingan dan bimbingan yang diberikan lembaga ini dapat membantu pemerintah daerah mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan.

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
				c. Pengelolaan manajemen risiko	Pengelolaan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga Penelitian IPDN dapat membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul, mengembangkan strategi mitigasi, dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa manajemen risiko selalu responsif terhadap perubahan situasi
			● Pemetaan SDM	a. Pengembangan evaluasi kebutuhan SDM	Dalam pengembangan evaluasi kebutuhan SDM, lembaga ini melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan personel dalam konteks tata kelola dan kelembagaan. Dengan mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan dan merancang rencana pengembangan SDM, lembaga dapat memastikan bahwa personel memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan tujuan lembaga.
				b. Pengukuran kinerja dan produktivitas	Pengukuran kinerja dan produktivitas menjadi fokus penting untuk menilai pencapaian individu dan tim. Dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala, lembaga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta memotivasi pengembangan lanjutan.
				c. Pemetaan jaringan dan kolaborasi	Pemetaan jaringan dan kolaborasi melibatkan identifikasi stakeholder dan pembangunan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dengan berkolaborasi dengan sektor pemerintah, lembaga riset lainnya, dan mitra strategis, Lembaga Penelitian IPDN dapat memperluas jaringan, meningkatkan pertukaran pengetahuan, dan menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan bersama.

NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi Pemerintahan Daerah (Perizinan, Pendapatan, Dll) 	<p>a. Sistem informasi terintegrasi dalam pengurusan perizinan</p>	<p>Melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam pengurusan perizinan, Lembaga Penelitian IPDN dapat membantu dalam membangun platform yang memungkinkan penggabungan data dan proses terkait perizinan. Ini tidak hanya mempercepat proses perizinan tetapi juga meminimalkan kesalahan administratif, meningkatkan akurasi data, dan membantu menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan responsif.</p>
				<p>b. Digitalisasi layanan dalam meningkatkan investasi daerah</p>	<p>Melalui digitalisasi layanan untuk meningkatkan investasi daerah, lembaga ini dapat memanfaatkan aplikasi mobile dan portal untuk memudahkan akses masyarakat dan investor terhadap informasi investasi dan regulasi. Penerapan pelayanan terpadu satu pintu dapat meningkatkan daya tarik daerah sebagai destinasi investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi positif terhadap kelembagaan pemerintahan.</p>
				<p>c. Modernisasi fasilitas penunjang dalam penguatan tata kelola dan kelembagaan</p>	<p>Dengan modernisasi fasilitas penunjang, Lembaga Penelitian IPDN dapat memastikan infrastruktur teknologi yang andal, aman, dan responsif. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan secara berkala juga menjadi bagian penting dari modernisasi ini, memastikan bahwa pegawai di lembaga dan pemerintahan daerah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi dengan baik.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Smart City 	<p>a. Pengembangan Infrastruktur Digital</p>	<p>Dalam konteks pengembangan infrastruktur digital, lembaga ini dapat membantu merancang dan melaksanakan inisiatif yang memanfaatkan Internet of Things (iot) dan jaringan 5G untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi dalam kota. Sensor pintar dan teknologi terkini dapat digunakan untuk mengumpulkan data real-time terkait dengan berbagai aspek kota, mulai dari lalu lintas hingga keamanan dan kualitas lingkungan.</p>



NO	BIDANG PRIORITAS KEMENDAGRI	TUJUAN	ISU POKOK	ISU SPESIFIK	KONFLIK PENELITIAN
				b. Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Berkelanjutan	Sistem pengukuran kinerja dan evaluasi berkelanjutan menjadi alat penting dalam memastikan kesuksesan Smart City. Lembaga Penelitian IPDN dapat berkontribusi dengan merancang Key Performance Indicators (KPI) yang relevan dan dapat diukur untuk mengukur efisiensi dan dampak dari berbagai inisiatif Smart City. Evaluasi berkelanjutan juga penting untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
				c. Strategi Adaptasi terhadap perubahan	Dalam hal strategi adaptasi terhadap perubahan, lembaga ini dapat menjadi motor inovasi. Mendukung riset dan pengembangan untuk memahami tren teknologi terbaru dan mendorong adopsi inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa Smart City berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapanarganya.

RENCANA INDUK PENELITIAN TAHUN 2024 – 2028

NO	TAHUN PENELITIAN	BIDANG	TEMA PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN
1	2024	Politik Dalam Negeri	1. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	- DKI Jakarta - Aceh
		Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2. Undang-Undang IKN	Kalimantan Timur
		Pelayanan Administrasi Kependudukan	3. Kecepatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Sulawesi Selatan
		Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah	4. Kemampuan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Jawa Tengah - Papua Barat Daya
		Pemerintahan Desa	5. Perencanaan pembangunan desa	Papua Selatan
		Penguatan Tata Kelola dan kelembagaan	6. Smart City	Jawa Timur
		Pemerintahan Desa	7. Peningkatan UMKM dan Kelompok masyarakat	Kalimantan Selatan
		Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah	8. Daerah Perbatasan Internasional (Timor Leste)	NTT
2	2025*	Politik Dalam Negeri	1. Kerukunan Umat beragama	- Maluku - Jambi
		Politik Dalam Negeri	2. Penanganan konflik sosial	- Maluku Utara - Bangka Belitung
		Pelayanan Administrasi Kependudukan	3. Administrasi Data Kependudukan	NTB
		Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah	4. Batas wilayah DOB	Papua Pegunungan
		Pemerintahan Desa	5. Penyelenggaraan pilkades	Kalimantan Tengah
		Penguatan Tata Kelola dan kelembagaan	6. Pelayanan Publik	Gorontalo

NO	TAHUN PENELITIAN	BIDANG	TEMA PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN
		Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan	7. Digitalisasi Pemerintahan Daerah	- Jawa Barat - Sulawesi Barat
		Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1. Undang-undang DKI	DKI Jakarta
		Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2. DOB, Penataan Daerah, Serah terima aset DOB	Papua Tengah
		Pelayanan Administrasi Kependudukan	3. Keamanan data pribadi	Sumatera Utara
		Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah	4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah	Riau
		Pemerintahan Desa	5. Penggunaan aset desa	Banten
		Penguatan Tata Kelola dan kelembagaan	6. Ketepatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	DI Yogyakarta
3	2026*	Politik Dalam Negeri	1. Pembinaan wawasan kebangsaan	Sumatera Barat
		Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2. Kerjasama Daerah	Lampung
		Pelayanan Administrasi Kependudukan	3. Standarisasi aplikasi	Kalimantan Utara
		Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah	4. Kinerja pembangunan daerah	Sulawesi Tengah
		Pemerintahan Desa	5. Efektifitas dan pencapaian sasaran APBDDes	Bali
		Penguatan Tata Kelola dan kelembagaan	6. Penguasaan manajemen risiko	Kepulauan Riau
4	2027*	Politik Dalam Negeri	1. Ketahanan pangan	Sumatera Selatan
		Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah	2. Urusan pemerintahan	Kalimantan Barat
		Pemerintahan Desa	3. Kualitas perangkat desa	Sulawesi Tenggara
5	2028*	Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah		
		Pemerintahan Desa		
		Pemerintahan Desa		

NO	TAHUN PENELITIAN	BIDANG	TEMA PENELITIAN	LOKASI PENELITIAN
		Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan	4. Pemetaan SDM	Aceh
		Politik Dalam Negeri	5. Pengembangan demokrasi	Jawa Tengah
		Pemerintahan Desa	6. Kelembagaan Desa	Jawa Timur

* Rencana Penelitian 2025-2028 masih dalam taraf Konsolidasi Perencanaan, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan pimpinan